



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga,
Jawa Tengah 53316 www.pn-purbalingga.go.id, pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

PENGUMUMAN

SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor : 2483/Pjb-Posbakum/Pn Purbalingga/XII/2025

Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan ini Pengadilan Negeri Purbalingga membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Umum

Nama Paket Pekerjaan	: Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum
Lingkup Pekerjaan	: Pemberian informasi, jasa konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Lokasi Pekerjaan	: Pengadilan Negeri Purbalingga
Alamat	: Jalan Letnan Akhmadi Nomor D-80, Bancar, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
Nilai Total HPS	: Rp. 28.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)
Sumber Dana	: DIPA Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun 2026

B. Formasi Penerimaan

1. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/ atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi;
2. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri selama tahun anggaran 2026 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Negeri;
3. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat dengan kualifikasi Pendidikan minimal S1 Hukum atau Sarjana Hukum Islam, memiliki staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam;

4. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak tanpa permohonan penggantian secara tertulis dan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen;

C. Persyaratan

1. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2026 Pengadilan Negeri Purbalingga yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Penyedia telah terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) LKPP;
3. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan memiliki surat pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dengan akreditasi minimal "C" atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi;
4. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga (dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili setempat sesuai Kabupaten/Kota Pengadilan Negeri) atau memiliki Surat Keputusan Kantor Cabang (bagi yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten/ Kota Pengadilan Negeri Purbalingga);
5. Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum (satu orang team leader dan satu orang petugas piket) dengan melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum;
6. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor (dibuktikan dengan nota pembelian/ foto inventaris yang akan disediakan);
7. Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga;
8. Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT) Tahun terakhir (tahun 2024);
9. Tidak masuk dalam daftar hitam, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon penyedia;
10. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan

dengan melampirkan fotokopi Kontrak dan SPMK;

11. Bersedia mengikuti uji kompetensi, menandatangani Pakta Integritas, Surat Pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi;
12. Pengadaan Jasa ini menggunakan mekanisme **Pengadaan Langsung (tidak berdasarkan Harga Penawaran terendah);**

D. Pendaftaran, Waktu dan Tempat

1. Pemasukan Dokumen Penawaran : 11 – 15 Desember 2025
2. Berkas Penawaran dan Lampirannya ditujukan kepada: Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga UP. Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2026 Pengadilan Negeri Purbalingga

E. Proses Pengadaan

1. Pembukaan Dokumen Penawaran : 16 Desember 2025
2. Evaluasi Dokumen Penawaran : 17 Desember 2025
3. Tes Kualifikasi : 17 Desember 2025

F. Penetapan Penyedia Jasa dan Penandatanganan SPK

1. Penetapan Penyedia Jasa : 19 Desember 2025
2. Penandatanganan SPK : 24 Desember 2025

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.



Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Purbalingga

Baiti Harfiah

Purbalingga, 10 Desember 2025
Pejabat Pengadaan Jasa Posbakum
Pengadilan Negeri Purbalingga

Janjang Sunarto